

ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2010-2016

SKRIPSI :



**Disusun Oleh :**

Nama : Agung Sulistiyanto  
Nomor Mahasiswa : 143140012  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Jurusan : Ilmu ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA

2019

ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2010-2016

SKRIPSI:

Disusun Oleh :

Nama : Agung Sulistiyanto

Nomor Induk Mahasiswa : 143140012

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

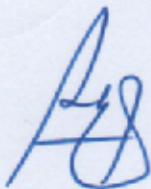
Jurusan : Ilmu Ekonomi



Skripsi ini disetujui pada tanggal.....

Oleh :

Dosen Pembimbing 1



DRA. Sri Rahayu Budi H,MSI  
19600919 198503 1 00 1

Dosen Pembimbing 2



Asih Sri Winarti, SE, M. Si  
NIK. 2 7409 99 0216 1

ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2010-2016

**SKRIPSI :**

**Disusun Oleh :**

Nama : Agung Sulistiyanto  
Nomor Mahasiswa : 143140012  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Jurusan : Ilmu Ekonomi



Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada tanggal .....

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'SR'.

DRA. Sri Rahayu Budi H.MSI  
NIP. 19600919 198503 1 00 1

Dosen Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AS'.

Asih Sri Winarti, SE, Msi  
NIP. 2 7409 99 0216 1

Dosen Penguji I

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AB'.

Dr. Ardito Bhinadi, SE, Msi  
NIP. 2 7309 97 0146 1

Dosen Penguji II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RA'.

Rini Dwi Astuti, SE, Msi  
NIP. 2 7510 99 0215 1

Diterima dan dinyatakan sah sebagai Skripsi pada tanggal.....

Jurusan Ilmu Ekonomi

Ketua

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'IK'.

Dr. I Ketut Nama, M.Si  
NIP. 196204151 988031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Sulistiyanto  
Nomor Mahasiswa : 143140012  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI TAHUN 2010-2016

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman dan atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Februari 2019

Yang menyatakan



Agung Sulistiyanto

NIM : 143140012

# **MOTTO**

**Gusti Allah Mboten Sare**

**Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.**

**(QS.Al-Insyirah:6)**

**Memilihlah tanpa ada penyesalan**

**(Mary Anne Radmacher)**

**Takut gagal bukan alasan untuk tidak mencoba sesuatu**

**(Frederick Smith)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya yang sangat saya sayangi dan banggakan atas semua kasih sayang, doa-doanya, fasilitasnya, dan segala bentuk dukungan morilnya untuk saya.
2. Saudara kandung saya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan saya.
3. Teman-temanku Kontrakan 7 Pintu dan WW Squad yang selalu memberikan support, membantu pada saat kuliah dan nasehat kalian baik dalam suka maupun duka.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya yang melimpah kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2016”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Sebagai ungkapan syukur, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. I Ketut Nama, MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi.
2. Ibu DRA. Sri Rahayu Budi H,MSI dan Ibu Asih Sriwinarti, SE, MSi selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan saya saran dan nasihat.
3. Alm. Ayah, Ibu, selaku orang tua saya tercinta dan keluarga besar saya yang lainnya yang tanpa lelah selalu memberikan doa dan nasihat tanpa henti dalam keseharian saya.
4. Terima kasih selalu menemani saya dan selalu memarahi saya ketika saya malas pergi ke kampus “Selviana Fernanda Wardani”.
5. Teman-temanku Kontrakan 7 Pintu dan WW Squad yang selalu memberikan support, membantu pada saat kuliah dan nasehat kalian.
6. Teman-temanku Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Angkatan 2014 yang selalu brjuang bersama.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap apa yang kurang didalam penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Sehingga, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak pihak yang bersangkutan.

Yogyakarta.....

Penulis

Agung Sulistiyanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Otonomi Daerah .....	9
2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah .....	9
2.1.2. Prinsip-prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah .....	10
2.2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	12
2.2.1. Pengertian APBD .....	12
2.2.2 Pendapatan Daerah .....	13
2.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah .....	13
2.2.2.2. Dana Perimbangan .....	14
2.2.2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	15
2.2.3. Belanja Daerah (APBD).....	15
2.2.3.1. Belanja Tidak Langsung .....	15
2.2.3.2. Belanja Langsung.....	17
2.3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	18
2.3.1. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah.....	18
2.3.2. Analisis Kinerja Belanja Daerah .....	20

2.4. Penelitian Terdahulu .....	22
2.5. Kerangka Pemikiran Konseptual .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	25
3.2. Data dan Sumber Data .....	25
3.3. Alat Analisis .....	25
3.3.1. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah.....	25
3.3.2. Analisis Kinerja Belanja Daerah.....	29
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	30
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah .....	33
4.1.1. Pertumbuhan Pendapatan.....	33
4.1.2. Derajat Desentralisasi .....	34
4.1.3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	35
4.1.4. Rasio Kemandirian .....	35
4.1.5 Rasio Efektivitas PAD .....	36
4.2. Analisis Kinerja Belanja Daerah .....	37
4.2.1 Pertumbuhan Belanja.....	37
4.2.2 Analisis Keserasian Belanja .....	38
4.3. Pembahasan Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Secara Keseluruhan	40
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	42
5.2. Saran .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN.....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : APBD Kabupaten Boyolali .....	4
Tabel 3.1 : Kriteria Kinerja Derajat Desentralisasi .....	26
Tabel 3.2 : Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	27
Tabel 3.3 : Kriteria Kemandirian Daerah.....	28
Tabel 3.4 : Kriteria Kinerja Efektivitas.....	28
Tabel 4.1.: Pertumbuhan Pendapatan Daerah .....	34
Tabel 4.2 : Derajat Desentralisasi .....	34
Tabel 4.3 : Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .....	35
Tabel 4.4 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	36
Tabel 4.5 : Rasio Efektivitas PAD .....	37
Tabel 4.6. :Pertumbuhan Belanja Daerah .....	38
Tabel 4.7 : Rasio Belanja Operasi.....	39
Tabel 4.8 : Rasio Belanja Modal .....	40
Tabel 4.9 : Kriteria Kinerja Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.....	41

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2010 .....	45
Lampiran 2 : APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 .....	46
Lampiran 3 : APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012.....	47
Lampiran 4 : APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2013.....	48
Lampiran 5 : APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2014.....	49
Lampiran 6 : APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 .....	50
Lampiran 7 : APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016.....	51
Lampiran 8 : APBD Kabupaten Boyolali .....	52
Lampiran 9 : Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	53
Lampiran 10 : Hasil Rasio Derajat Desentralisasi .....	54
Lampiran 11 : Hasil Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	55
Lampiran 12 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	56
Lampiran 13 : Hasil Rasio Derajat Desentralisasi Rasio efektifitas PAD .....	57
Lampiran 14 : Pertumbuhan Belanja Daerah .....	58
Lampiran 15 : Rasio Belanja Operasi .....	59
Lampiran 16 : Rasio Belanja Modal .....	60



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2016, Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja keuangan Daerah di Kabupaten Boyolali periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah berguna menjadi tolak ukur bagaimana tingkat keberhasilan Pemerintah dalam mengelola keuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari realisasi anggaran pendapatan asli daerah, kementerian keuangan Kabupaten Boyolali tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan informasi yang lengkap mengenai kinerja pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Boyolali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas PAD sangat efektif tetapi ketergantungan daerah sangat tinggi dan kemandirian daerah rendah sekali.

Kata Kunci : Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah.

## ABSTRACT

*This research is entitled Analysis of Regional Income and Expenditures of Boyolali District Year 2010-2016, This study aims to obtain information about Regional financial performance in Boyolali Regency in the period 2010 to 2016. Analysis of Performance of Revenue and Expenditures Useful areas become a benchmark of how successful Government in managing finances. The type of research used is descriptive quantitative research. This study uses secondary data obtained from the realization of regional original revenue budgets, the Ministry of Finance of Boyolali Regency in 2010 to 2016. Data that has been collected is then followed, interpreted, and analyzed so as to provide complete information on the performance of regional income and expenditure in Boyolali Regency. The results of this study indicate that the effectiveness of PAD is very effective but the dependence of the regions is very high and the regional kemadirian is very low.*

*Keywords: Regional Revenue and Expenditure Performance.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah (Nanik wahyuni,2007).

Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri. Disamping itu otonomi daerah memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. APBD merupakan hal vital dalam suatu sistem pengelolaan keuangan pada suatu pemerintahan daerah dan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pengembangan daerah. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. Oleh sebab itu, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercermin pada kinerja Pengelolaan Keuangan.

Menurut (Utomo 2011) pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah, melihat kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya Mahmudi (2010). Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik.. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Boyolali antara lain: Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, dan Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Alasan mengambil Kabupaten Boyolali sebagai bahan Skripsi adalah ingin mengetahui kinerja pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya dari tahun 2010-2016.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah Kabupaten Boyolali harus lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas mampu teratasi. Memang kebanyakan kota-kota kecil di seluruh Indonesia masih belum bisa mandiri dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru berbuat tidak semestinya dengan melakukan berbagai penyimpangan, yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Analisis kinerja Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Boyolali adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Boyolali dalam bidang

Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali untuk kurun waktu tertentu.

Tabel 1.1.  
APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2016

No.	Uraian	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>917.898.637.498</b>	<b>1.096.013.965.218</b>	<b>1.271.240.332.047</b>	<b>1.463.130.392.441</b>	<b>1.673.664.647.062</b>	<b>1.937.150.203.967</b>	<b>1.993.495.112.162</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	86.485.635.223	96.737.566.506	127.725.206.935	160.752.449.651	227.516.495.964	260.633.637.928	292.310.032.226
2	Pendapatan Transfer	689.906.462.945	757.145.871.785	893.578.301.422	968.601.409.865	1.060.318.727.801	1.092.341.267.915	1.358.444.509.320
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	141.506.539.330	242.130.526.927	249.936.823.690	69.377.137.292	109.418.069.369	144.423.615.270	183.703.688.073
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>912.584.586.077</b>	<b>1.101.848.598.928</b>	<b>1.269.226.813.508</b>	<b>1.269.226.813.508</b>	<b>1.617.991.646.314</b>	<b>1.832.767.460.541</b>	<b>2.057.281.803.197</b>
1	Belanja Langsung	186.131.701.080	283.636.166.586	350.427.577.797	408.876.886.133	550.232.345.748	587.318.959.330	642.430.309.863
2	Belanja Tidak Langsung	726.452.884.997	818.212.432.342	918.799.235.711	1.012.954.075.291	1.067.759.300.566	1.245.448.501.211	1.414.851.493.334
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>5.314.051.421</b>	<b>-5.834.633.710</b>	<b>2.013.518.539</b>	<b>193.903.578.933</b>	<b>55.673.000.748</b>	<b>104.382.743.426</b>	<b>-63.786.691.035</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dilihat dari tabel 1.1 Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali berdasarkan APBD diatas menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi, ini dilihat dari pendapatan transfer pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hal tersebut untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2016.**”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan umum, yaitu :

1. Bagaimana Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2016?

2. Bagaimana Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2016?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2016.
2. Untuk menganalisis Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2016.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi instansi terkait yaitu :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Boyolali untuk masa yang akan datang.
2. Bagi UPN Veteran Yogyakarta  
Hasil penelitian ini diharapkan menambah bahan bacaan, wawasan dan pengetahuan, baik bagi mahasiswa Universitas UPN Veteran Yogyakarta maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap topik yang diteliti oleh penulis.
3. Bagi Penulis  
Dengan penelitian ini penulis dapat memperluas wawasan serta memperoleh pengetahuan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Keaslian Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, alat analisis, dan periode penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Boyolali dengan tahun anggaran 2010 sampai tahun 2016. Dengan menggunakan jenis data sekunder dan menggunakan alat analisis Pertumbuhan

Pendapatan Daerah, Rasio Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Pertumbuhan Belanja Daerah, Rasio Keserasian.

Tabel 1.2.

Keaslian Penelitian

No	PENELITI	SAMPEL	ALAT ANALISIS	HASIL ANALISIS
1	Crisilvia hiariey, (2007)	Kota Ambon	Rasio Kemandirian, RasioKetergantungan, Rasio,Desentralisasi fiscal,Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi.	Analisis varians pendapatan daerah Kota Ambon selama periode 2013-2015 sebesar 99,19%, menunjukkan kinerja keuangan pendapatan yang baik. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan Kota Ambon selama periode 2013-2014 sebesar 92,05%, menunjukkan ketergantungan keuangan daerah sangat tinggiDari perhitungan Rasio Desentralisasi fiskal selama periode 2013-2015 Kota Ambon rata-rata sebesar 9,67%, menunjukkan masih sangat rendah.Dari Perhitunagn Rasio Ewektifitas PAD Kota Ambon selama periode 2013-2015 tergolong dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata sebesar 114,01% Tingkat efisiensi Kota Ambon sudah sangat efisien ,pemugutan PAD Kota Ambon rata-rata di bawah 10%.
2	Rani Febri (2016)	Kota Samarinda	1. Varians Pendapatan 2. Pertumbuhan Pendapatan 3. Rasio Derajat Desentralisasi 4. Rasio Kemandirian Keuangan 5. Rasio Efektivitas 6. Rasio Varian Belanja 7. Analisis Pertumbuhan Pendapatan 8. Rasio Belanja Oprasi 9. Rasio Belanja Modal Rasio Efisiensi	Varians Pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum dapat dikatakan kurang baik hipotesis ditolak. Kota Samarinda dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum mengalami fluktuasi (naik turun) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Derajat Desentralisasi Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum dikatakan kurang baik dengan rata-rata sebesar 11,22%, maka hipotesis ditolak. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Kemandirian Pemkot Samarinda dalam

Lanjutan tabel 1.2

No	PENELITI	SAMPEL	ALAT ANALISIS	HASIL ANALISIS
				<p>memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dari tahun 2010- 2014 mengalami kenaikan. Kinerja keuangan ,dilihat dari efektivitas PAD selama tahun 2010-2014 secara umum efektif dengan rata-rata 100,37%. Kinerja keuangan dilihat dari rasio varian belanja PERIODE 2010-2014 secara umum kurang baik,dengan rata-rata target realisasi APBD sebesar 1,10%</p> <p>Kinerja keuangan daerah Kota Samarinda dilihat dari rasio pertumbuhan periode 2010-2014 secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif, Hasil perhitungan menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,26%</p>
3	Siti Rofingatun (2016)	Kabupaten Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Kemandirian</li> <li>2. Rasio Ketergantungan</li> <li>3. Rasio Desentralisasi fiskal</li> <li>4. Rasio Efektivitas</li> <li>5. Rasio Efisiensi</li> </ol>	<p>Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jayapura selama periode 2010-2014 sebesar 6,94%, menunjukkan kemandirian keuangan daerah sangat kurang</p> <p>Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura selama periode 2010-2014 sebesar 74,27%, yang menunjukkan ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi Dari perhitungan Rasio Desentralisasi fiskal selama periode 2010-2014 Kabupaten Jayapura rata-rata sebesar 5,11%, menunjukkan dalam peningkatan dalam peningkatan PAD masih sangatlah kurang.</p> <p>Dari Perhitunagn Rasio Evektivitas PAD Kabupaten Jayapura selama periode 2010-2014 tergolong dala kategori sangat</p>

Lanjutan tabel 1.2

No	PENELITI	SAMPEL	ALAT ANALISIS	HASIL ANALISIS
				efektive dengan rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 116,09% Tingkat efesiensi Kabupaten Jayapura selama periode 2010-2014 sudah sangat efesien ,pemugutan PAD Kabupaten Jayapura 5 tahun terakhir adalah sebesar 4,38%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, alat analisis, dan periode penelitian, penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Boyolali dengan tahun anggaran 2010 sampai tahun 2016. Dengan menggunakan jenis data sekunder dan menggunakan alat analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Pertumbuhan Belanja Daerah, Analisis Keserasian Belanja Daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Otonomi Daerah**

##### **2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah**

Pada bagian ini akan disampaikan tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa literatur tentang pendapatan daerah dan belanja daerah yang terdiri dari pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja daerah. Otonomi Daerah merupakan isu strategis konsep pembangunan ekonomi berbasis Desentralisasi di Indonesia. Tujuan yang paling penting dan kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk memberi wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah terutama dalam mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut.

Otonomi daerah membawa implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu; pertama adalah semakin meningkatnya biaya ekonomi (high cost economy) dan yang ke dua adalah efisiensi dan efektifitas. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan (Handayani 2009). Berdasarkan ide yang terkandung dalam konsep otonomi, maka (Sarundajang 2002) juga menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut :

1. Dari segi politik mengikut sertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun mendukung politik dan kebijakan nasional.

2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan.
3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri.
4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Menurut (Halim 2002), ciri-ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah :

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, olehkarena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri-ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pemerintahannya. oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya dapat di ukur melalui kinerja keuangan dan tingkat kemandirian daerah.

### **2.1.2. Prinsip-prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah**

Daerah otonomi adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan yang dikenal dalam (Undang-undang Nomor 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Adapun daerah provinsi, berotonomi secara terbatas yakni menyangkut koordinasi antar/lintas kabupaten/kota, serta kewenangan pusat

yang dilimpahkan pada Provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota yang belum mampu dilaksanakan maka diambil alih oleh provinsi (Halim 2002).

Secara konsepsional, jika dicermati berlakunya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), dengan tidak adanya perubahan struktur daerah otonom, maka memang masih lebih banyak ingin mengatur pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Disisi lain, pemerintah kabupaten/kota yang daerah otonomnya terbentuk hanya berdasarkan kesejahteraan pemerintahan, maka akan sulit untuk berotonomi secara nyata dan bertanggungjawab di masa mendatang. Otonomi daerah dalam (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999) adalah otonomi luas yaitu adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi maupun kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Menurut Halim (2007) maka prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999) adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan serta potensi dan keanekaragaman.
2. Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Otonomi yang luas dan utuh untuk kabupaten, otonomi daerah yang luas untuk provinsi.
4. Sesuai dengan konstitusi sehingga terjamin hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi sehingga dalam kabupaten tidak ada wilayah adminitrasi.
6. Meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah wilayah administrasi.
7. Asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi.

8. Asas tugas bantuan diberikan dari pemerintah kepada daerah serta dari pemerintah dan daerah kepada desa.

Tujuan otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya dengan tetap berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi dijadikan sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari daerah otonom menjadi Negara dalam Negara. Daerah otonom adalah batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya Halim (2007).

## **2.2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

### **2.2.1. Pengertian APBD**

Manurut (Nurlan Darise 2008) Anggaran Pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

2. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

4. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

5. Fungsi Distribusi Anggaran

Daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan

6. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

### **2.2.2 Pendapatan Daerah**

Menurut Abdul Halim (2007) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun 12 anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Menurut Nurlan Darise (2008) Pendapatan Daerah digolongkan menjadi tiga :

#### **2.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pajak daerah Pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan

dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potong ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

#### **2.2.2.2. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

#### **2.2.2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mencakup: hibah/ bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

#### **2.2.3. Belanja Daerah (APBD)**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah (Siregar 2015). Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

##### **2.2.3.1. Belanja Tidak Langsung**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

1. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
4. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
5. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
6. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang

bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

8. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### **2.2.3.2. Belanja Langsung**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
3. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

### **2.3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mahmudi (2010) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dibedakan dua bagian Kinerja Pendapatan Daerah dan Kinerja Belanja Daerah, yaitu :

#### **2.3.1. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah**

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat terlihat dari realisasi pendapatan dan anggaran. Apabila realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik. Berdasarkan realisasi anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Pendapatan Daerah menurut Mahmudi (2016) dengan beberapa cara :

1. Analisis varians
2. Pertumbuhan Pendapatan Daerah
  - a. Pertumbuhan Pendapatan Daerah
  - b. Pertumbuhan Pajak Daerah
  - c. Pertumbuhan Retribusi Daerah
  - d. Pertumbuhan Pendapatan transfer
3. Menghitung Rasio Keuangan
  - a. Rasio Kemandirian Daerah
  - b. Rasio Ketergantungan Daerah
  - c. Derajat Desentralisasi
  - d. Rasio Efektifitas PAD
  - e. Rasio Efisiensi PAD

- f. Rasio Efektifitas Pajak Daerah
- g. Rasio Efisiensi Pajak Daerah
- h. Derajat Kontribusi BUMD
- i. Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman
- j. Rasio Hutang Terhadap Pendapatan

Berdasarkan dari banyak cara diatas, beberapa dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran.

2. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total jumlah pendapatan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

## 5. Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Semakin tinggi Rasio Efektifitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

### **2.3.2. Analisis Kinerja Belanja Daerah**

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Menurut Mahmudi (2016), Analisis Kinerja Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara:

1. Analisis Varians Belanja
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
3. Analisis Keserasian Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja
5. Rasio Belanja Terhadap PDRB

Berdasarkan dari banyak cara diatas, beberapa dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Analisis Pertumbuhan Belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### 2. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara

optimal. Hal ini terkait anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Supaya fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis Keserasian Belanja Daerah antara lain berupa :

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya, pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung akan memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah. Penyebabnya adalah pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi sehingga pemerintah daerah tersebut cenderung melakukan belanja yang bersifat jangka pendek.

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang, selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi. Penyebab terjadinya adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Chrisilvia Hiariey) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon periode 2013 -2015 dikatakan baik dilihat dari varians pendapatan daerah dengan rata-rata 99,99%, pertumbuhan pendapatan daerah 13,30%. Derajat desentralisasi menunjukkan 9,67%, tingkat ketergantungan yang masih tinggi dengan rata-rata 89,77%, rasio efektifitas pajak lebih dari 100% dan efisiensi pajak dibawah 10%. Kemudian varians belanja rata-rata 92,58%, pertumbuhan belanja 12,70%, keserasian belanja dialokasikan kepada belanja operasi dibandingkan biaya modal dengan rata-rata 14,96% dan efisiensi belanja lebih dari 100%.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Rani Febri 2016), Dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda periode 2010-2014. dilihat dari varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari varians belanja, pertumbuhan belanja, belanja operasi, belanja modal, dan efisiensi belanja. Adapun rasio keuangan yang digunakan meliputi: analisis varians (selisih) pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, Derajat Desentralisasi, rasio efektifitas PAD, analisis varians (selisih) belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda secara umum dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan Varians Pendapatan Daerah dengan rata-rata 1,17%, Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 16,75%, Rasio Kemandirian Daerah rata-rata 12,73%, Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 11,22%, dan rasio efektivitas rata-rata besar dari 100% yaitu 100,37%. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda secara umum dikatakan baik. Data-data yang

diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) berupa suatu dokumentasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Siti Rofingatun 2015) dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Novi Manopo ini menunjukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Minahasa tahun 2008-2013, tingkat efisiensi senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkatan yang makin efisien, Dimana pada tahun 2008 tingkatannya berada pada kriteria tidak efisien, yaitu 103,66%. Rasio tersebut terus berfluktuatif sampai tahun 2013 dengan rasio sebesar 97,69% atau kriteria kurang efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa system pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa masih kurang baik. Untuk efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2008-2013 sendiri, yang dilakukan pemerintah daerah berkisar antara 93,34% sampai 171%. Angka capaian ini mengimplikasikan bahwa tingkat efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Minahasa dalam mengelola keuangan daerahnya menjadi semakin efektif.

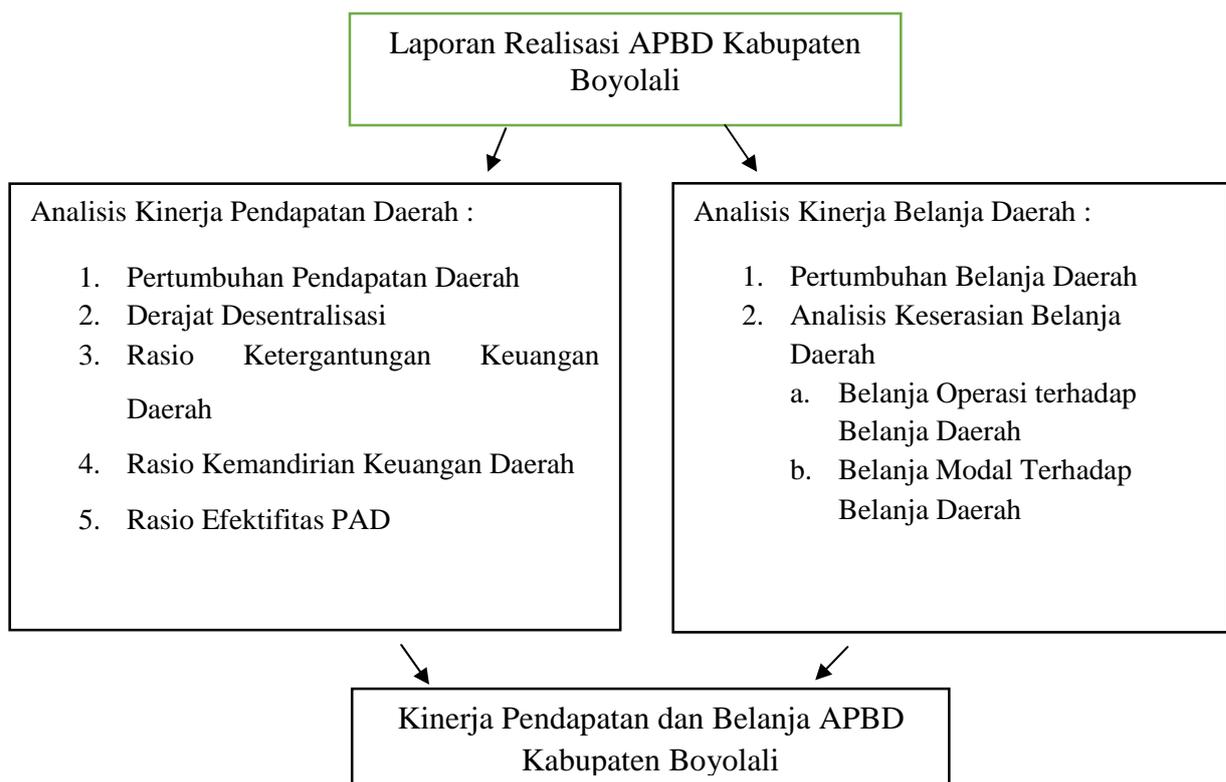
## **2.5. Kerangka Pemikiran Konseptual**

Mengacu pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kerangka penelitian ini sebagai berikut:

Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan suatu instansi dalam kurun waktu atau periode tertentu. Jika dihubungkan dengan sebuah instansi pemerintah daerah maka Kinerja Keuangan menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja dalam penggunaan anggaran yang menunjukkan seberapa efisiennya daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari pengukuran Kinerja Keuangan adalah mengevaluasi Kinerja Keuangan masa lalu dan menyediakan cara tepat secara berkelanjutan untuk mengevaluasi Kinerja Keuangan.

Analisis Kinerja Pendapatan Daerah dapat dinilai berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan dapat dihitung dengan cara Rasio Pertumbuhan, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi PAD.

Analisis Kinerja Belanja Daerah dapat dinilai berdasarkan laporan Realisasi Anggaran dan dapat dihitung dengan cara Analisis Keserasian Belanja daerah, dan Analisis Efisiensi Belanja Daerah. Melihat Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Belanja Daerah maka dapat dinilai Kinerja Keuangan APBD secara umum, jika semua Kinerja Keuangan tersebut menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka dikatakan Kinerja Keuangan APBD baik.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Suharsimi (2002), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berusaha untuk pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya.

#### **3.2. Data dan Sumber Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tahapan dokumentasi. Data diperoleh dari kantor BAPPEDA Kabupaten Boyolali berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016.

#### **3.3. Alat Analisis**

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **3.3.1. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah**

Analisis Kinerja Pendapatan keuangan daerah sangat banyak, tetapi dalam penelitian ini dibatasi hanya dengan lima cara sebagai berikut:

##### **1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah**

Pertumbuhan Pendapatan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Pertumbuhan Pendapatan Daerah ini menunjukkan derajat kontribusi PAD, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pertumbuhan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan Pendapatan Daerah ini dirumuskan sebagai berikut Mahmudi (2010):

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan th t} = \frac{\text{Pendapatan daerah Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

Indikator dari pertumbuhan adalah jika hasil kinerja anggaran positif terjadi peningkatan kinerja pendapatan daerah, jika hasil kinerja anggaran negatif maka terjadi penurunan kinerja pendapatan daerah (Mahmudi, 2010).

## 2. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Derajat Desentralisasi ini menunjukkan derajat kontribusi PAD, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Derajat Desentralisasi ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Secara umum nilai presentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah dikategorikan sebagai berikut pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1  
Kriteria Kinerja Derajat Desentralisasi

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 50,00	Sangat Baik
40,00 – 50,00	Baik
30,00 – 40,00	Cukup
20,00 – 30,00	Sedang
10,00 - 20,00	Kurang
0,00 – 10, 00	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, (1991).

## 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

Tabel 3.2  
Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan(%)	Kriteria
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, (1991)

#### 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total jumlah pendapatan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Secara umum tingkat kemandirian daerah, presentase pendapatan asli daerah terhadap transfer pusat dikategorikan sebagai berikut pada Tabel 3.3

Tabel 3.3  
Kriteria Kemandirian Daerah dan Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

<b>Kinerja Keuangan (%)</b>	<b>Kemampuan Kemandirian</b>	<b>Pola hubungan</b>
0 – 25	Rendah sekali	Instruktif
26 – 50	Rendah	Konsultatif
51 – 75	Sedang	Partisipatif
76 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2001).

yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

1. Pola hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan etonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

## 5. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut Mahmudi (2010):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Secara umum nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan seperti pada Tabel 3.4:

Tabel 3.4  
Kriteria Kinerja Efektivitas

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup efektif
75- 89	Kurang efektif
< 75	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi, (2010).

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD indikator rasio efektifitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien.

### 3.3.2. Analisis Kinerja Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Untuk mengukur kinerja belanja daerah di Kabupaten Boyolali, digunakan dua rasio sebagai berikut:

## 1. Rasio Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan rumus berikut Mahmudi (2010):

$$\text{Pertumbuhan belanja thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja daerah Th } t - \text{Realisasi Belanja Th } (t-1)}{\text{Realisasi Belanja Th } (t-1)} \times 100\%$$

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun, dapat dikatakan positif jika naik dan negatif jika turun. pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu untuk naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, dan penyesuaian makro ekonomi.

## 2. Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. agar fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. menurut Mahmudi (2010), semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini:

### a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja Operasi dengan total belanja daerah Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90.

Tabel 3.5  
Rasio Keserasian Belanja Operasi

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
60-90	Ideal

Sumber; Mahmudi 2010

Dalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi) 2010:

$$\text{Rasio Belanja Operasi thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Tabel 3.6  
Rasio Keserasian Belanja Modal

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
5-20	Ideal

Sumber; Mahmudi 2010

Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi 2010):

### **3.4. Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini variabel yang dapat menjelaskan tentang bagaimana kinerja pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

#### **1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian ini menggunakan APBD Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016. Dalam penelitian ini APBD yang digunakan dalam satuan Rupiah (Rp).

#### **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan data realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016. Dalam penelitian ini PAD yang digunakan dalam satuan Rupiah (Rp).

#### **3. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Total Pendapatan daerah dalam struktur APBD yang dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016. Dalam penelitian ini Total Pendapatan Daerah yang digunakan dalam satuan Rupiah (Rp).

#### **4. Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Termasuk dalam Belanja Operasi adalah belanja pegawai tidak langsung, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang pemerintah daerah di Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016. Dalam penelitian ini Belanja operasi yang digunakan dalam satuan Rupiah (Rp).

## **5. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pembangunan daerah yang meliputi pelaksanaan proyek fisik dan non fisik pemerintah daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016. Dalam penelitian ini Belanja Pembangunan yang digunakan dalam satuan Rupiah (Rp).

## **6. Transfer**

Transfer pada dasarnya juga merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Untuk pemerintah provinsi pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota. Untuk pemerintah kabupaten/kota pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil pendapatan ke desa dalam satuan Rupiah (Rp).

## **7. Belanja Daerah**

Total belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Boyolali pada suatu periode tahun anggaran 2010-2016. Dalam penelitian ini Total Belanja Daerah yang digunakan dalam satuan Rupiah (Rp).

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil perhitungan dari kinerja Pendapatan dan kinerja Belanja Daerah Kabupaten Boyolali. Perhitungan ini dilakukan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang dihitung dengan menggunakan metode rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah. Dalam melakukan penilaian kinerja Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah. Kabupaten Boyolali digunakan data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010–2016. APBD Kabupaten Boyolali merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat setiap tahunnya untuk disajikan secara transparan untuk pertanggung jawaban dalam mengelola Pendapatan dan Belanja Daerah. Maka dari itu evaluasi dalam pengelolaan laporan Pendapatan dan Belanja perlu dilakukan, supaya Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dapat terpacu untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun-tahun kedepan.

#### **4.1. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah**

Berdasarkan dari data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016, maka dapat diketahui kinerja Pendapatan Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010–2016 dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari enam rasio sebagai berikut:

##### **4.1.1. Pertumbuhan Pendapatan**

Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Berikut ini merupakan hasil dari pertumbuhan daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016 sebagai berikut Tabel 4.1:

Tabel 4.1  
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2010-2016

TAHUN	PERTUMBUHAN PENDAPATAN (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan (%)	PERTUMBUHAN
2010	917.898.637.498	15.36	POSITIF
2011	1.096.013.965.218	19.40	POSITIF
2012	1.271.240.332.047	15.99	POSITIF
2013	1.463.130.392.441	15.09	POSITIF
2014	1.673.664.647.062	14.39	POSITIF
2015	1.937.150.203.967	15.74	POSITIF
2016	1.993.495.112.162	2.91	POSITIF
Rata-Rata		13.92	POSITIF

Sumber : hasil olah data (Lampiran 1)

Berdasarkan Tabe 4.1 dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah mengalami fluktuatif.. Dapat dilihat pada tahun 2011 memiliki tingkat Pertumbuhan Pendapatan paling tinggi sebesar 19.40%, dan pada tahun 2016 memiliki tingkat Pertumbuhan Pendapatan paling rendah sebesar 2,91%, dikarenakan penurunan retribusi, jika dilihat realisasinya angka PDRB Kabupaten Boyolali lebih tinggi dibandingkan target dan realisasi pertumbuhan. Pertumbuhan Pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Boyolali mengalami Pertumbuhan Pendapatan secara positif atau negatif. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 13,92%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali memiliki Pertumbuhan Pendapatan Positif.

#### **4.1.2. Derajat Desentralisasi**

Berdasarkan hasil perhitungan dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016, maka derajat desentralisasi Pemerintah daerah tahun anggaran 2010-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Derajat Desentralisasi Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2010-2016**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Rp)	DERAJAT DESENTRALISASI(%)	KRITERIA
2010	86.485.635.223	917.898.637.498	9.42	SANGAT KURANG
2011	96.737.566.506	1.096.013.965.218	8.83	SANGAT KURANG
2012	127.725.206.935	1.271.240.332.047	10.05	KURANG
2013	160.752.449.651	1.463.130.392.441	10.99	KURANG
2014	227.516.495.964	1.673.664.647.062	13.59	KURANG
2015	260.633.637.928	1.937.150.203.967	13.45	KURANG
2016	292.310.032.226	1.993.495.112.162	14.66	KURANG
RATA-RATA			11.57	KURANG

Sumber : hasil olah data (Lampiran 2)

Berdasarkan tabel 4.2 Pada Derajat Desentralisasi mengalami fluktuatif. Dapat dilihat pada tahun 2016 memiliki tingkat Derajat Desentralisasi paling tinggi sebesar 14,66%, dan pada tahun 2011 memiliki tingkat Derajat Desentralisasi paling rendah sebesar 8,83%. Rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 11,57%, hal ini berarti masuk dalam kriteria kurang.

#### **4.1.3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil perhitungan dari data Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016, maka rasio ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali**  
**Tahun Anggaran 2010-2016**

TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER (Rp)	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Rp)	RASIO KETERGANTUNGAN DAERAH(%)	KRITERIA
2010	689.906.462.945	917.898.637.498	75.16	SANGAT TINGGI
2011	757.145.871.785	1.096.013.965.218	69.08	SANGAT TINGGI
2012	893.578.301.422	1.271.240.332.047	70.29	SANGAT TINGGI
2013	968.601.409.865	1.463.130.392.441	66.20	SANGAT TINGGI
2014	1.060.318.727.801	1.673.664.647.062	63.35	SANGAT TINGGI
2015	1.092.341.267.915	1.937.150.203.967	56.39	SANGAT TINGGI
2016	1.358.444.509.320	1.993.495.112.162	68.14	SANGAT TINGGI
RATA-RATA			66.95	SANGAT TINGGI

Sumber : hasil olah data (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel 4.3 Pada Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengalami fluktuatif. Dapat dilihat pada tahun 2012 memiliki tingkat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah paling tinggi sebesar 70,29%, dan pada tahun 2015 memiliki tingkat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah paling rendah sebesar 56,39%, Rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 66,95%, hal ini berarti ketergantungan keuangan Kabupaten Boyolali masih sangat tinggi.

#### 4.1.4. Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil perhitungan dari data Pendapatan Asli Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, maka Rasio Kemandirian daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali  
Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kemampuan Kemandirian	Pola Hubungan
2010	86.485.635.223	689.906.462.945	12.54	Rendah sekali	Instruktif
2011	96.737.566.506	757.145.871.785	12.78	Rendah sekali	Instruktif
2012	127.725.206.935	893.578.301.422	14.29	Rendah sekali	Instruktif
2013	160.752.449.651	968.601.409.865	16.60	Rendah sekali	Instruktif
2014	227.516.495.964	1.060.318.727.801	21.46	Rendah sekali	Instruktif
2015	260.633.637.928	1.092.341.267.915	23.86	Rendah sekali	Instruktif
2016	292.310.032.226	1.358.444.509.320	21.52	Rendah sekali	Instruktif
Rata-rata			17.58	Rendah sekali	Instruktif

Sumber: hasil olah data (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali mengalami fluktuatif. Dapat dilihat pada tahun 2015 memiliki tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah paling tinggi sebesar 23,86%, dan pada tahun 2010 memiliki tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah paling rendah sebesar 12,54%, Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 17,58%, sehingga kemandirian keuangan daerah kabupaten boyolali masuk kriteria rendah sekali dan hubungan antara pusat dengan daerah termasuk pola instruktif.

#### 4.1.5. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil perhitungan dari data Realisasi Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016, maka Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Rasio efektifitas PAD Kabupaten Boyolali  
Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2010	86.485.635.223	80.019.996.672	108,08	Sangat Efektif
2011	96.737.566.506	81.390.501.888	118,86	Sangat Efektif
2012	127.725.206.935	108.796.100.608	117,40	Sangat Efektif
2013	160.752.449.651	142.676.525.056	112,67	Sangat Efektif
2014	227.516.495.964	181.450.407.936	125,39	Sangat Efektif
2015	260.633.637.928	221.873.995.776	117,47	Sangat Efektif
2016	292.310.032.226	250.959.626.240	116,48	Sangat Efektif
RATA-RATA			116,62	Sangat Efektif

Sumber : hasil olah data (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel 4.5 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali mengalami fluktuatif. Dapat dilihat pada tahun 2014 memiliki tingkat Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah paling tinggi sebesar 125,39%, dan pada tahun 2010 memiliki tingkat Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah paling rendah sebesar 108,08%, Rata-rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 116,62%. Hal ini menggambarkan tingkat Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sangat efektif walaupun ada penurunan di tahun 2010 yang disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Boyolali menaikan target PAD terlalu tinggi.

#### 4.2. Analisis Kinerja Belanja Daerah

Berdasarkan dari data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016, maka dapat diketahui kinerja Belanja Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010–2016 dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari dua rasio sebagai berikut:

#### 4.2.1. Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan belanja Daerah bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun, pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu untuk naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, dan penyesuaian makro ekonomi.

Tabel 4.6  
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali  
Tahun Anggaran 2010-2016

TAHUN	PERTUMBUHAN BELANJA (Rp)	Pertumbuhan Belanja (%)	PERTUMBUHAN
2010	912.584.586.077	16,16	POSITIF
2011	1.101.848.598.928	20,74	POSITIF
2012	1.269.226.813.508	15,19	POSITIF
2013	1.421.830.961.424	12,02	POSITIF
2014	1.617.991.646.314	13,80	POSITIF
2015	1.832.767.460.541	13,27	POSITIF
2016	2.057.281.803.197	12,25	POSITIF
RATA-RATA		14,55	POSITIF

Sumber : hasil olah data (Lampiran 6)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami fluktuatif. Dapat dilihat pada tahun 2011 memiliki tingkat Pertumbuhan Belanja paling tinggi sebesar 20,74%, dan pada tahun 2013 memiliki tingkat Pertumbuhan Belanja paling rendah sebesar 12,02%, Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah sebesar 14,55%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali memiliki Pertumbuhan Belanja Positif.

#### 4.2.2. Analisis Keserasian Belanja

Keserasian Belanja merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah daerah dalam memproitaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah memproitaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

**a. Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah**

Hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.7:

Tabel 4.7  
Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Kabupaten Boyolali  
Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi ( % )	Kriteria
2010	776.475.841.064	912.584.586.077	85,09	Ideal
2011	920.477.219.786	1.101.848.598.928	83,54	Ideal
2012	999.461.708.483	1.269.226.813.508	78,75	Ideal
2013	1.103.321.172.054	1.421.830.961.424	77,6	Ideal
2014	1.201.281.953.254	1.617.991.646.314	74,25	Ideal
2015	1.337.247.783.105	1.832.767.460.541	72,96	Ideal
2016	1.356.128.700.817	2.057.281.803.197	65,92	Ideal
Rata-rata			76,87	Ideal

Sumber hasil olah data (Lampiran 7)

Menuurut Mahmudi (2016) yang mengatakan bahwa umumnya belanja operasi mendominasi total belanja daerah dengan rentang nilai antara 60-90%. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.6. pada tahun 2010 memiliki tingkat Rasio Belanja Operasi terhadap belanja daerah paling tinggi sebesar 85,09%, dan pada tahun 2016 memiliki tingkat Rasio Belanja Operasi terhadap belanja daerah paling rendah sebesar 65,92%. Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah menunjukkan rata-rata sebesar 76,87%, termasuk dalam kriteria ideal. yang artinya pemerintah daerah dalam membelanjakan dananya untuk belanja operasi terhadap Belanja Daerah sudah baik.

**b. Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah**

Hasil perhitungan Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.8:

Tabel 4.8  
Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten Boyolali  
Tahun anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)	Kriteria
2010	100.101.216.583	912.584.586.077	10,97%	Ideal
2011	138.437.022.809	1.101.848.598.928	12,56%	Ideal
2012	207.758.567.336	1.269.226.813.508	16,37%	Ideal
2013	249.111.725.695	1.421.830.961.424	17,52%	Ideal
2014	303.852.817.878	1.617.991.646.314	18,78%	Ideal
2015	310.175.465.196	1.832.767.460.541	16,92%	Ideal
2016	373.915.606.382	2.057.281.803.197	18,18%	Ideal
Rata-rata			15,90%	Ideal

Sumber: hasil olah data (Lampiran 8)

Rasio Belanja modal terhadap belanja daerah memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi Rasio Belanja modal terhadap belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi 2010). Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui hasil dari perhitungan Rasio belanja modal terhadap belanja daerah paling tinggi pada tahun 2014 sebesar 18,78%, dan pada tahun 2010 memiliki Perhitungan Rasio Belanja Modal terhadap belanja daerah paling rendah sebesar 10,97. Perhitungan Rasio Belanja Modal terhadap belanja daerah memiliki rata-rata sebesar 15,90%, memiliki kriteria ideal.

Dari dua perhitungan Rasio Keceragaman tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi Terhadap belanja daerah dan Rasio Belanja Modal terhadap belanja daerah termasuk kriteria ideal, namun presentase rasio belanja operasi terhadap belanja daerah lebih besar. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam membelanjakan dana daerah lebih memproitaskan pada belanja operasi, hal ini karena kontribusi terhadap pembangunan lebih besar dari pada belanja modal.

### 4.3. Pembahasan Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Secara Keseluruhan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, untuk mengetahui Kinerja Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016 dapat dilihat pada Tabel Kriteria 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8  
Kriteria Kinerja Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun anggaran 2010-2016

Kinerja Pendapatan Daerah						Kinerja Belanja Daerah		
						Rasio Keserasian		
Tahun	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Rasio Desentralisasi	Rasio Ketergantungan Daerah	Rasio Kemandirian Daerah	Rasio Efektivitas PAD	Pertumbuhan Belanja	Rasio Belanja Operasi	Rasio Belanja Modal
2010	Positif	Sangat Kurang	Sangat Tinggi	Rendah Sekali	Sangat Efektif	Positif	Ideal	Ideal
2011	Positif	Sangat Kurang	Sangat Tinggi	Rendah Sekali	Sangat Efektif	Positif	Ideal	Ideal
2012	Positif	Kurang	Sangat Tinggi	Rendah Sekali	Sangat Efektif	Positif	Ideal	Ideal
2013	Positif	Kurang	Sangat Tinggi	Rendah Sekali	Sangat Efektif	Positif	Ideal	Ideal
2014	Positif	Kurang	Sangat Tinggi	Rendah Sekali	Sangat Efektif	Positif	Ideal	Ideal
2015	Positif	Kurang	Sangat Tinggi	Rendah Sekali	Sangat Efektif	Positif	Ideal	Ideal
2016	Positif	Kurang	Sangat Tinggi	Rendah Sekali	Sangat Efektif	Positif	Ideal	Ideal

Sumber: Hasil kriteria data (lampiran)

Dari tabel 4.8 kinerja pendapatan daerah pada tahun 2010-2016, berdasarkan Kriteria Pertumbuhan Pendapatan memiliki kriteria positif, berdasarkan Rasio Desentralisasi pada tahun 2010 dan 2011 memiliki kriteria sangat kurang, pada tahun 2012-2013 memiliki kriteria kurang, berdasarkan Rasio Ketergantungan Daerah memiliki kriteria sangat tinggi, berdasarkan Rasio Kemandirian Daerah memiliki kriteria rendah sekali, berdasarkan Rasio Efektivitas PAD memiliki kriteria sangat efektif.

Dilihat secara keseluruhan Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016 secara umum dapat dikatakan kurang baik, meskipun pertumbuhan pendapatan daerah positif, efektivitas PAD sangat efektif tetapi ketergantungan daerah sangat tinggi dan kemandirian daerah rendah sekali.

Hal ini terjadi karena transfer dari pemerintah pusat masih besar yang mengakibatkan kurang baik bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali itu sendiri. Pendapatan transfer dari pusat yang besar, artinya Pemerintah Kabupaten Boyolali belum mampu untuk membiayai semua belanja-belanja untuk kebutuhan

daerahnya tersebut, sehingga secara keseluruhan dalam pengelolaan keuangan masih banyak bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah Kabupaten Boyolali.

Sedangkan kinerja Belanja Daerah berdasarkan Pertumbuhan Belanja memiliki kriteria positif, berdasarkan Rasio Keserasian Belanja Operasi terhadap belanja daerah memiliki kriteria ideal, berdasarkan Rasio Keserasian Belanja Modal terhadap belanja daerah memiliki kriteria ideal. Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016 secara umum dapat dikatakan baik, karena kinerja Pertumbuhan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali positif. Untuk Rasio Keserasian Semua ideal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali tahun 2010-2016 dapat disimpulkan bahwa:

1. Kabupaten Boyolali pada tahun 2010-2016 memiliki Kinerja Pendapatan Daerah yang didasarkan:
  - a. Kinerja Pertumbuhan Pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dengan rata-rata Pertumbuhan Pendapatan sebesar 13,92%, masuk dalam kriteria positif.
  - b. Derajat Desentralisasi Kabupaten Boyolali dengan rata-rata 11,57%, masuk dalam kriteria kurang.
  - c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dengan rata-rata 66,95%, masuk dalam kriteria sangat tinggi.
  - d. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Boyolali dengan rata-rata 17,58%, memiliki kriteria rendah sekali pola hubungan instruktif atau masih bergantung kepada pemerintah pusat.
  - e. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata 116,62%, memiliki kriteria sangat efektif.
2. Kabupaten Boyolali pada tahun 2010-2016 memiliki Kinerja Belanja Daerah yang baik, dikarenakan:
  - a. Kinerja Pertumbuhan Belanja pemerintah daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016 memiliki Pertumbuhan yang positif.
  - b. Analisis Keserasian Belanja Daerah
    - 1) Rasio Belanja Operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016 memiliki kriteria Ideal.
    - 2) Rasio Belanja Modal terhadap belanja daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2010-2016 memiliki kriteria Ideal.

## **5.2. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Boyolali diharapkan meningkatkan Pendapatan Daerah, untuk menurunkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hendaknya mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan penerimaan PAD.
2. Pemerintah Kabupatean Boyolali perlu melakukan pembekalan dan pelatihan kepada pelaksana kebijakan daerah dan merekrut orang-orang yang memang berkompeten pada bidangnya, sehingga tidak menurunkan hasil dari target keuangan yang ingin dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, H. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora) Tahun 2007-2011. SKRIPSI Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Adhim, Mohammad, 2008. Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sarolangun. *Thesis. Universitas Negeri Jambi*.
- Agustin, F. 2007. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar). SKRIPSI Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Assidiqi, B. 2014. Analisis Kinerja Keuangan APBD Pada Kabupaten Klaten Periode 2013-2014. SKRIPSI Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mamesah, D, J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurulafifah, T. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010. SKRIPSI Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pratama, A. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah ( Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). SKRIPSI. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Rosalina,E.2008. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus di Propinsi Sumatra Barat).*Thesis*.Universitas Gadjja Mada.

Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Universitas Kristen Petra.

Sawir,A.2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.

Wahyuni, Nanik. 2007. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengolaan Keuangan Daerah Kota Malang .  
*Jurnal EL-Muhasaba* Vol 1 No. 1;01-2010. UIN Maliki. Malang.

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1 :

### APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2010

No.	Akun	Anggaran	Realisasi	Persen
1	PENDAPATAN	912.314.990.592	917.898.637.498	100,61%
2	PAD	80.019.996.672	86.485.635.223	108,08%
3	Pajak daerah	12.000.000.000	14.094.132.345	117,45%
4	Retribusi daerah	26.325.000.192	25.382.928.677	96,42%
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.416.999.936	4.513.283.314	132,08%
6	Lain-lain PAD yang sah	38.279.000.064	42.495.290.887	111,01%
7	Daper	682.045.014.016	689.906.462.945	101,15%
8	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	38.806.999.040	46.668.570.945	120,26%
9	Dana alokasi umum	587.574.018.048	587.574.192.000	100%
10	Dana alokasi khusus	55.664.001.024	55.663.700.000	100%
11	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	150.249.996.288	141.506.539.330	94,18%
12	Hibah	0	0	0%
13	Dana darurat	0	0	0%
14	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	27.158.999.040	27.769.444.662	102,25%
15	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	101.409.996.800	89.200.089.668	87,96%
16	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	21.681.000.448	0	0%
17	Lain-lain	0	24.537.005.000	0%
18	BELANJA	964.589.977.600	912.584.586.077	94,61%
19	Belanja Tidak Langsung	817.276.977.152	726.452.884.997	88,89%
20	Belanja Pegawai TL	679.232.995.328	630.912.806.963	92,89%
21	Belanja Bunga	75.000.000	32.584.118	43,45%
22	Belanja Subsidi	0	0	0%
23	Belanja Hibah	73.910.001.664	29.484.073.956	39,89%
24	Belanja Bantuan sosial	21.517.000.704	30.015.891.530	139,50%
25	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	3.248.999.936	3.493.260.795	107,52%
26	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	36.764.000.256	30.031.647.635	81,69%
27	Belanja tidak terduga	2.528.999.936	2.482.620.000	98%
28	Belanja Langsung	147.313.999.872	186.131.701.080	126,35%
29	Belanja Pegawai	12.021.999.616	0	0%
30	Belanja Barang dan Jasa	85.933.998.080	86.030.484.497	100,11%
31	Belanja Modal	49.358.000.128	100.101.216.583	202,81%
32	PEMBIAYAAN	0	75.088.119.955	0,00%
33	Penerimaan	52.275.000.000	85.407.062.628	163,38%
34	SILPA TA sebelumnya	59.569.000.000	82.407.062.628	138,34%
35	Pencairan dana cadangan	54.308.000.000	0	0%
36	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0%
37	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	3.000.000.000	0%
38	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000.000	0	0,00%
39	Pengeluaran	2.261.000.000	10.318.942.673	456,39%
40	Pembentukan Dana Cadangan	7.294.000.000	0	0%
41	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	7.275.195.000	0,00%
42	Pembayaran Pokok Utang	4.250.000.000	3.043.747.673	71,62%
43	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0%
44	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0%
45	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0%

## Lampiran 2 :

### APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011

No.	Akun	Anggaran	Realisasi	Persen
1	PENDAPATAN	1.038.988.476.416	1.096.013.965.218	105,49%
2	PAD	81.390.501.888	96.737.566.506	118,86%
3	Pajak daerah	17.129.190.400	19.256.739.005	112,42%
4	Retribusi daerah	17.180.848.128	20.136.945.018	117,21%
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.626.734.080	4.514.063.875	97,56%
6	Lain-lain PAD yang sah	42.453.725.184	52.829.818.608	124,44%
7	Daper	751.306.735.616	757.145.871.785	100,78%
8	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	42.345.553.920	48.501.909.785	114,54%
9	Dana alokasi umum	641.787.691.008	641.483.262.000	99,95%
10	Dana alokasi khusus	67.173.498.880	67.160.700.000	99,98%
11	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	206.291.238.912	242.130.526.927	117,37%
12	Hibah	0	4.995.846.766	0%
13	Dana darurat	0	0	0%
14	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	30.280.495.104	39.852.814.367	131,61%
15	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	157.540.990.976	174.730.880.794	110,91%
16	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	18.469.754.880	0	0%
17	Lain-lain	0	22.550.985.000	0%
18	BELANJA	1.103.339.192.320	1.101.848.598.928	99,86%
19	Belanja Tidak Langsung	813.572.358.144	818.212.432.342	100,57%
20	Belanja Pegawai TL	728.263.753.728	725.208.429.436	99,58%
21	Belanja Bunga	75.000.000	27.372.372	36,50%
22	Belanja Subsidi	0	0	0%
23	Belanja Hibah	15.894.599.680	16.932.113.000	106,53%
24	Belanja Bantuan sosial	25.104.590.848	33.110.161.200	131,89%
25	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	3.260.228.096	2.968.748.550	91,06%
26	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Per	37.869.375.488	39.965.607.784	105,54%
27	Belanja tidak terduga	3.104.819.968	0	0%
28	Belanja Langsung	289.766.899.712	283.636.166.586	97,88%
29	Belanja Pegawai	11.072.533.504	0	0%
30	Belanja Barang dan Jasa	137.376.030.720	145.199.143.778	105,69%
31	Belanja Modal	141.318.324.224	138.437.022.809	97,96%
32	PEMBIAYAAN	64.350.750.000	79.474.940.309	123,50%
33	Penerimaan	75.842.300.000	86.407.377.981	113,93%
34	SilPA TA sebelumnya	66.331.186.000	81.249.340.307	122,49%
35	Pencairan dana cadangan	0	0	0%
36	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0%
37	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	3.000.000.000	0	0%
38	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	6.511.114.000	5.158.037.674	79,22%
39	Pengeluaran	11.491.550.000	6.932.437.672	60,33%
40	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0%
41	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.947.550.000	6.888.690.000	99,15%
42	Pembayaran Pokok Utang	3.044.000.000	43.747.672	1,44%
43	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	0	0%
44	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0%
45	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0%

### Lampiran 3:

#### APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012

No.	Akun	Anggaran	Realisasi	Persen
1	PENDAPATAN	1.172.995.309.568	1.271.240.332.047	108,38%
2	PAD	108.796.100.608	127.725.206.935	117,40%
3	Pajak daerah	19.021.400.064	23.282.495.561	122,40%
4	Retribusi daerah	29.952.813.056	36.721.243.324	122,60%
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.695.543.808	5.509.165.487	117,33%
6	Lain-lain PAD yang sah	55.126.343.680	62.212.302.563	112,85%
7	Daper	881.489.870.848	893.578.301.422	101,37%
8	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	40.827.305.984	52.915.755.422	129,61%
9	Dana alokasi umum	780.301.828.096	780.301.856.000	100%
10	Dana alokasi khusus	60.360.691.712	60.360.690.000	100%
11	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	182.709.408.648	249.936.823.690	136,79%
12	Hibah	0	170.045.035	0%
13	Dana darurat	0	0	0%
14	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	31.319.326.720	54.047.109.655	172,57%
15	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	123.180.498.944	167.626.904.000	136,08%
16	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	28.209.584.128	0	0%
17	Lain-lain	0	28.092.765.000	0%
18	BELANJA	1.232.583.655.424	1.269.226.813.508	102,97%
19	Belanja Tidak Langsung	873.673.064.448	918.799.235.711	105,17%
20	Belanja Pegawai TL	767.710.461.952	809.948.823.763	105,50%
21	Belanja Bunga	44.000.000	11.825.809	26,88%
22	Belanja Subsidi	0	0	0%
23	Belanja Hibah	31.616.604.160	41.761.915.000	132,09%
24	Belanja Bantuan sosial	5.011.964.928	5.070.133.450	101,16%
25	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	3.254.452.992	2.950.387.750	90,66%
26	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	63.014.708.104	59.056.149.939	93,72%
27	Belanja tidak terduga	3.020.826.880	0	0%
28	Belanja Langsung	358.910.623.744	350.427.577.797	97,64%
29	Belanja Pegawai	29.730.463.744	0	0%
30	Belanja Barang dan Jasa	146.404.655.104	142.669.010.461	97,45%
31	Belanja Modal	182.775.480.320	207.758.567.336	113,67%
32	PEMBIAYAAN	59.588.286.000	71.706.691.514	120,34%
33	Penerimaan	67.699.596.000	80.875.671.042	119,46%
34	SiLPA TA sebelumnya	58.327.546.000	73.640.306.599	126,25%
35	Pencairan dana cadangan	0	0	0%
36	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0%
37	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	74.250.000	0%
38	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	9.372.050.000	7.161.114.443	76,41%
39	Pengeluaran	8.111.310.000	9.168.979.528	113,04%
40	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0%
41	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	7.871.310.000	8.472.115.000	107,63%
42	Pembayaran Pokok Utang	240.000.000	196.864.528	82,03%
43	Pemberian Pinjaman Daerah	0	500.000.000	0%
44	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0%
45	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0%

## Lampiran 4 :

### APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2013

No.	Akun	Anggaran	Realisasi	Persen
1	PENDAPATAN	1.355.583.455.232	1.463.130.392.441	107,93%
2	PAD	142.676.525.056	160.752.449.651	112,67%
3	Pajak daerah	33.917.773.824	43.467.755.843	128,16%
4	Retribusi daerah	38.759.366.656	41.482.304.590	107,03%
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.509.166.080	6.425.251.926	116,63%
6	Lain-lain PAD yang sah	64.490.229.760	69.377.137.292	107,58%
7	Daper	967.113.768.960	968.601.409.865	100,15%
8	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	36.194.279.424	37.681.928.865	104,11%
9	Dana alokasi umum	871.686.012.928	871.685.981.000	100%
10	Dana alokasi khusus	59.233.501.184	59.233.500.000	100%
11	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	245.793.210.368	333.776.532.925	135,80%
12	Hibah	6.194.999.808	4.716.952.466	76,14%
13	Dana darurat	0	0	0%
14	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	43.214.389.248	62.142.167.449	143,80%
15	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	169.626.910.720	237.833.565.000	140,21%
16	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	26.756.919.296	0	0%
17	Lain-lain	0	29.083.848.010	0%
18	BELANJA	1.422.890.369.024	1.421.830.961.424	99,93%
19	Belanja Tidak Langsung	965.968.855.040	1.012.954.075.291	104,86%
20	Belanja Pegawai TL	831.962.611.712	865.383.487.830	104,02%
21	Belanja Bunga	0	0	0%
22	Belanja Subsidi	0	0	0%
23	Belanja Hibah	54.099.595.264	73.011.847.250	134,96%
24	Belanja Bantuan sosial	3.432.499.968	5.160.676.536	150,35%
25	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	94.351.000	94.216.000	99,86%
26	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	74.379.796.480	69.303.847.675	93,18%
27	Belanja tidak terduga	2.000.000.000	0	0%
28	Belanja Langsung	456.921.415.680	408.876.886.133	89,49%
29	Belanja Pegawai	28.569.088.000	0	0%
30	Belanja Barang dan Jasa	179.493.470.208	159.765.160.438	89,01%
31	Belanja Modal	248.858.869.760	249.111.725.695	100,10%
32	PEMBIAYAAN	67.306.802.000	76.837.452.472	114,16%
33	Penerimaan	73.721.802.000	84.573.452.472	114,72%
34	SILPA TA sebelumnya	64.749.610.000	73.720.210.053	113,85%
35	Pencairan dana cadangan	0	0	0%
36	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0%
37	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	211.078.000	1.200.178.127	568,59%
38	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	8.761.114.000	9.653.064.292	110,18%
39	Pengeluaran	6.415.000.000	7.736.000.000	120,59%
40	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0%
41	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.415.000.000	7.736.000.000	120,59%
42	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0%
43	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0%
44	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0%
45	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0%

## Lampiran 5 :

### APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2014

No.	Akun	Anggaran	Realisasi	Persen
1	PENDAPATAN	1.569.313.521.664	1.673.664.647.062	106,65%
2	PAD	181.450.407.936	227.516.495.964	125,39%
3	Pajak daerah	41.540.198.400	53.983.465.918	129,95%
4	Retribusi daerah	60.152.954.880	54.305.486.020	90,28%
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.422.075.904	9.809.474.657	104,11%
6	Lain-lain PAD yang sah	70.335.176.704	109.418.069.369	155,57%
7	Daper	1.059.244.081.152	1.060.318.727.801	100,10%
8	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	34.927.902.720	36.002.551.801	103,08%
9	Dana alokasi umum	943.220.457.472	943.220.456.000	100%
10	Dana alokasi khusus	81.095.720.960	81.095.720.000	100%
11	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	328.619.098.112	385.829.423.297	117,41%
12	Hibah	6.579.999.744	7.771.641.611	118,11%
13	Dana darurat	0	0	0%
14	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	61.260.398.592	83.174.405.000	135,77%
15	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	242.433.654.784	261.782.884.000	107,98%
16	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	18.345.052.160	33.100.492.686	180,43%
17	Lain-lain	0	0	0%
18	BELANJA	1.624.300.847.104	1.617.991.646.314	99,61%
19	Belanja Tidak Langsung	1.076.090.634.240	1.067.759.300.566	99,23%
20	Belanja Pegawai TL	922.655.981.568	920.321.358.853	99,75%
21	Belanja Bunga	0	0	0%
22	Belanja Subsidi	0	0	0%
23	Belanja Hibah	64.947.286.016	63.560.321.000	97,86%
24	Belanja Bantuan sosial	3.437.499.904	3.204.078.063	93,21%
25	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	94.351.000	99.511.500	105,47%
26	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemde	82.955.509.760	80.574.031.150	97,13%
27	Belanja tidak terduga	2.000.000.000	0	0%
28	Belanja Langsung	548.210.245.632	550.232.345.748	100,37%
29	Belanja Pegawai	35.108.962.304	32.183.332.532	91,67%
30	Belanja Barang dan Jasa	210.625.150.976	214.196.195.338	101,70%
31	Belanja Modal	302.476.132.352	303.852.817.878	100,46%
32	PEMBIAYAAN	54.987.322.000	106.768.048.091	194,17%
33	Penerimaan	66.725.322.000	118.506.048.091	177,60%
34	SiLPA TA sebelumnya	66.376.408.000	118.136.883.489	177,98%
35	Pencairan dana cadangan	0	0	0%
36	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0%
37	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	87.800.000	261.114.452	297,40%
38	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	261.114.000	108.050.150	41,38%
39	Pengeluaran	11.738.000.000	11.738.000.000	100%
40	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0%
41	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	11.738.000.000	11.738.000.000	100%
42	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0%
43	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0%
44	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0%
45	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0%

## Lampiran 6 :

### APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

No.	Akun	Anggaran	Realisasi	Persen
1	PENDAPATAN	1.791.988.989.952	1.937.150.203.967	108,10%
2	PAD	221.873.995.776	260.633.637.928	117,47%
3	Pajak daerah	62.129.500.160	76.861.736.744	123,71%
4	Retribusi daerah	35.893.821.440	31.065.824.178	86,55%
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.594.479.104	8.282.461.736	109,06%
6	Lain-lain PAD yang sah	116.256.202.752	144.423.615.270	124,23%
7	Daper	1.072.447.094.784	1.092.341.267.915	101,86%
8	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	36.034.723.840	35.288.695.915	97,93%
9	Dana alokasi umum	968.089.600.000	968.089.632.000	100%
10	Dana alokasi khusus	68.322.721.792	88.962.940.000	130,21%
11	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	497.667.932.160	584.175.298.124	117,38%
12	Hibah	6.220.000.256	21.958.312.300	353,03%
13	Dana darurat	0	0	0%
14	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	80.995.336.192	106.801.964.824	131,86%
15	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	377.871.794.176	413.125.282.000	109,33%
16	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	32.580.804.608	0	0%
17	Lain-lain	0	42.289.739.000	0%
18	BELANJA	1.841.503.141.888	1.832.767.460.541	99,53%
19	Belanja Tidak Langsung	1.278.195.662.848	1.245.448.501.211	97,44%
20	Belanja Pegawai TL	1.058.753.937.408	994.070.294.683	93,89%
21	Belanja Bunga	0	0	0%
22	Belanja Subsidi	0	0	0%
23	Belanja Hibah	66.567.012.352	57.720.025.000	86,71%
24	Belanja Bantuan sosial	3.444.499.968	8.313.969.288	241,37%
25	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	7.746.615.808	8.197.128.000	105,82%
26	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Perr	139.683.561.472	177.147.084.240	126,82%
27	Belanja tidak terduga	2.000.000.000	0	0%
28	Belanja Langsung	563.307.479.040	587.318.959.330	104,26%
29	Belanja Pegawai	36.355.547.136	0	0%
30	Belanja Barang dan Jasa	246.938.058.752	277.143.494.134	112,23%
31	Belanja Modal	280.013.897.728	310.175.465.196	110,77%
32	PEMBIAYAAN	49.514.114.000	131.349.163.281	265,28%
33	Penerimaan	68.261.114.000	162.702.163.281	238,35%
34	SILPA TA sebelumnya	68.000.000.000	162.441.048.839	238,88%
35	Pencairan dana cadangan	0	0	0%
36	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0%
37	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	0%
38	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	261.114.000	261.114.442	100%
39	Pengeluaran	18.747.000.000	31.353.000.000	167,24%
40	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0%
41	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	18.747.000.000	29.353.000.000	156,57%
42	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0%
43	Pemberian Pinjaman Daerah	0	2.000.000.000	0%
44	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0%
45	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0%

## Lampiran 7 :

### APBD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016

No.	Akun	Anggaran	Realisasi	Persen
1	PENDAPATAN	2.087.937.507.328	1.993.495.112.162	95,48%
2	PAD	250.959.626.240	292.310.032.226	116,48%
3	Pajak daerah	69.891.497.984	84.362.391.724	120,70%
4	Retribusi daerah	14.709.104.640	14.899.472.525	101,29%
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.695.610.368	9.344.479.904	107,46%
6	Lain-lain PAD yang sah	157.663.412.224	183.703.688.073	116,52%
7	Daper	1.504.412.565.504	1.358.444.509.320	90,30%
8	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	44.180.455.424	46.125.444.420	104,40%
9	Dana alokasi umum	1.032.744.009.728	1.032.744.010.000	100%
10	Dana alokasi khusus	427.488.116.736	279.575.054.900	65,40%
11	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	332.565.282.816	342.740.570.616	103,06%
12	Hibah	1.168.359.936	15.000.000.000	1283,85%
13	Dana darurat	0	0	0%
14	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	107.456.282.624	107.894.687.616	100,41%
15	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	167.801.077.760	167.801.074.000	100%
16	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	56.139.554.816	0	0%
17	Lain-lain	0	52.044.809.000	0%
18	BELANJA	2.150.966.624.256	2.057.281.803.197	95,64%
19	Belanja Tidak Langsung	1.415.727.808.512	1.414.851.493.334	99,94%
20	Belanja Pegawai TL	1.062.606.733.312	1.054.100.511.336	99,20%
21	Belanja Bunga	0	0	0%
22	Belanja Subsidi	0	0	0%
23	Belanja Hibah	19.539.574.784	23.365.711.000	119,58%
24	Belanja Bantuan sosial	10.940.000.256	10.147.775.000	92,76%
25	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	8.645.661.696	8.897.316.650	102,91%
26	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	311.995.760.640	318.340.179.348	102,03%
27	Belanja tidak terduga	2.000.000.000	0	0%
28	Belanja Langsung	735.238.815.744	642.430.309.863	87,38%
29	Belanja Pegawai	68.481.298.432	0	0%
30	Belanja Barang dan Jasa	286.656.954.368	268.514.703.481	93,67%
31	Belanja Modal	380.100.575.232	373.915.606.382	98,37%
32	PEMBIAYAAN	63.029.114.000	206.869.504.937	328,21%
33	Penyerahan	75.261.114.000	236.101.504.937	313,71%
34	SiLPA TA sebelumnya	75.000.000.000	235.731.906.707	314,31%
35	Pencairan dana cadangan	0	108.483.768	0%
36	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0%
37	Penyerahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	0%
38	Penyerahan Kembali Pemberian Pinjaman	261.114.000	261.114.462	100%
39	Pengeluaran	12.232.000.000	29.232.000.000	238,98%
40	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0%
41	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	12.232.000.000	29.232.000.000	238,98%
42	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0%
43	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0%
44	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0%
45	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0%

**Lampiran 8 :**

**APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2016**

No.	Uraian	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>917.898.637.498</b>	<b>1.096.013.965.218</b>	<b>1.271.240.332.047</b>	<b>1.463.130.392.441</b>	<b>1.673.664.647.062</b>	<b>1.937.150.203.967</b>	<b>1.993.495.112.162</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	86.485.635.223	96.737.566.506	127.725.206.935	160.752.449.651	227.516.495.964	260.633.637.928	292.310.032.226
2	Pendapatan Transfer	689.906.462.945	757.145.871.785	893.578.301.422	968.601.409.865	1.060.318.727.801	1.092.341.267.915	1.358.444.509.320
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	141.506.539.330	242.130.526.927	249.936.823.690	69.377.137.292	109.418.069.369	144.423.615.270	183.703.688.073
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>912.584.586.077</b>	<b>1.101.848.598.928</b>	<b>1.269.226.813.508</b>	<b>1.269.226.813.508</b>	<b>1.617.991.646.314</b>	<b>1.832.767.460.541</b>	<b>2.057.281.803.197</b>
1	Belanja Langsung	186.131.701.080	283.636.166.586	350.427.577.797	408.876.886.133	550.232.345.748	587.318.959.330	642.430.309.863
2	Belanja Tidak Langsung	726.452.884.997	818.212.432.342	918.799.235.711	1.012.954.075.291	1.067.759.300.566	1.245.448.501.211	1.414.851.493.334
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>5.314.051.421</b>	<b>-5.834.633.710</b>	<b>2.013.518.539</b>	<b>193.903.578.933</b>	<b>55.673.000.748</b>	<b>104.382.743.426</b>	<b>-63.786.691.035</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

**Lampiran 9 :**

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali  
Tahun Anggaran 2010-2016

TAHUN	PERTUMBUHAN PENDAPATAN (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan (%)
2010	917.898.637.498	15,36
2011	1.096.013.965.218	19,40
2012	1.271.240.332.047	15,99
2013	1.463.130.392.441	15,09
2014	1.673.664.647.062	14,39
2015	1.937.150.203.967	15,74
2016	1.993.495.112.162	2,91
Rata-Rata		13,92

Sumber : hasil data olah

**Lampiran 10 :**

**Derajat Desentralisasi Kabupaten Boyolali  
Tahun Anggaran 2010-2016**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Rp)	DERAJAT DESENTRALISASI(%)
2010	86.485.635.223	917.898.637.498	9,42
2011	96.737.566.506	1.096.013.965.218	8,83
2012	127.725.206.935	1.271.240.332.047	10,05
2013	160.752.449.651	1.463.130.392.441	10,99
2014	227.516.495.964	1.673.664.647.062	13,59
2015	260.633.637.928	1.937.150.203.967	13,45
2016	292.310.032.226	1.993.495.112.162	14,66
RATA-RATA			11,57

Sumber : hasil data olah

**Lampiran 11 :**

**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali  
Tahun Anggaran 2010-2016**

TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER (Rp)	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Rp)	RASIO KETERGANTUNGAN DAERAH(%)
2010	689.906.462.945	917.898.637.498	75,16
2011	757.145.871.785	1.096.013.965.218	69,08
2012	893.578.301.422	1.271.240.332.047	70,29
2013	968.601.409.865	1.463.130.392.441	66,20
2014	1.060.318.727.801	1.673.664.647.062	63,35
2015	1.092.341.267.915	1.937.150.203.967	56,39
2016	1.358.444.509.320	1.993.495.112.162	68,14
RATA-RATA			66,95

Sumber : hasil olah data

**Lampiran 12 :**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali  
Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)
2010	86.485.635.223	689.906.462.945	12,54
2011	96.737.566.506	757.145.871.785	12,78
2012	127.725.206.935	893.578.301.422	14,29
2013	160.752.449.651	968.601.409.865	16,60
2014	227.516.495.964	1.060.318.727.801	21,46
2015	260.633.637.928	1.092.341.267.915	23,86
2016	292.310.032.226	1.358.444.509.320	21,52
Rata-rata			17,58

Sumber: hasil olah data

**Lampiran 13 :**

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Boyolali  
Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Efektivitas (%)
2010	86.485.635.223	80.019.996.672	108,08
2011	96.737.566.506	81.390.501.888	118,86
2012	127.725.206.935	108.796.100.608	117,40
2013	160.752.449.651	142.676.525.056	112,67
2014	227.516.495.964	181.450.407.936	125,39
2015	260.633.637.928	221.873.995.776	117,47
2016	292.310.032.226	250.959.626.240	116,48
RATA-RATA			116,62

Sumber : hasil olah data

**Lampiran 14 :**

Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali  
Tahun Anggaran 2010-2016

TAHUN	PERTUMBUHAN BELANJA (Rp)	Pertumbuhan Belanja (%)
2010	912.584.586.077	16,16
2011	1.101.848.598.928	20,74
2012	1.269.226.813.508	15,19
2013	1.421.830.961.424	12,02
2014	1.617.991.646.314	13,80
2015	1.832.767.460.541	13,27
2016	2.057.281.803.197	12,25
RATA-RATA		14,55

Sumber : hasil olah data

**Lampiran 15 :**

**Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Kabupaten Boyolali  
Tahun Anggaran 2010-2016**

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi ( % )
2010	776.475.841.064	912.584.586.077	85,09
2011	920.477.219.786	1.101.848.598.928	83,54
2012	999.461.708.483	1.269.226.813.508	78,75
2013	1.103.321.172.054	1.421.830.961.424	77,6
2014	1.201.281.953.254	1.617.991.646.314	74,25
2015	1.337.247.783.105	1.832.767.460.541	72,96
2016	1.356.128.700.817	2.057.281.803.197	65,92
Rata-rata			76,87

Sumber hasil olah data

**Lampiran 16 :**

**Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten Boyolali  
Tahun anggaran 2010-2016**

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2010	100.101.216.583	912.584.586.077	10,97%
2011	138.437.022.809	1.101.848.598.928	12,56%
2012	207.758.567.336	1.269.226.813.508	16,37%
2013	249.111.725.695	1.421.830.961.424	17,52%
2014	303.852.817.878	1.617.991.646.314	18,78%
2015	310.175.465.196	1.832.767.460.541	16,92%
2016	373.915.606.382	2.057.281.803.197	18,18%
Rata-rata			15,90%